

LAPORAN KAJIAN

KESIAPAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) DI PROVINSI DKI JAKARTA

A. LATAR BELAKANG

Pandemi COVID-19 menuntut dunia untuk beradaptasi. Seluruh pihak dituntut untuk menghindari aktivitas yang berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Pelaksanaan kegiatan secara daring merupakan salah satu solusi adaptif di tengah masa pandemi. Berbagai aspek telah menerapkan pelaksanaan kegiatan secara daring sebagai langkah preventif penyebaran COVID-19, salah satunya aspek pendidikan.

Kegiatan belajar mengajar di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 sejauh ini dilakukan secara daring. Dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan masih diperlukan beberapa adaptasi serta perbaikan yang meliputi antara lain, gawai, komputer, koneksi internet, serta televisi. Sebagai salah satu faktor pendukung, kualitas koneksi internet Indonesia saat ini dapat dikatakan kurang dari cukup. Saat ini, kualitas koneksi internet Indonesia menempati peringkat 115 dari 176 negara dengan rata-rata kecepatan internet sebesar 23,04 Mbps (Megabit per second) (Ookla, 2020).

Dalam praktiknya, kegiatan belajar mengajar secara daring di Indonesia dapat dikatakan belum siap. Hal tersebut didasari oleh kualitas elemen pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia masih dapat dikatakan cukup rendah. Selain itu, proses pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia belum memiliki acuan kurikulum pembelajaran daring. Selanjutnya, kualitas faktor pendukung proses pembelajaran secara daring Indonesia juga masih belum merata. Apabila penggunaan metode daring masih diteruskan sementara kualitas faktor pendukungnya masih rendah, maka kualitas luaran proses pendidikan akan terus menurun.

Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah melalui empat menteri telah menerbitkan surat keputusan bersama (SKB) pada bulan Maret 2021 yang mengizinkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai Juli 2021 dengan pembatasan. SKB yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan mendorong institusi pendidikan dan sekolah agar bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran baru yang dimulai Juli 2021.

Provinsi DKI juga menjadi salah satu daerah yang didorong untuk mempersiapkan diri untuk pelaksanaan PTM. Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai macam persiapan untuk pelaksanaan PTM, termasuk dengan melakukan ujicoba yang dikordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada awal Juni 2021. Dengan statusnya sebagai ibukota provinsi, walaupun belum masuk pada daerah yang direkomendasikan, pelaksanaan ujicoba PTM tentu akan menjadi indikator nasional apakah kebijakan pelaksanaan PTM pada tahun ajaran baru 2021 menjadi kebijakan yang tepat atau justru sebaliknya.

Pada sisi lain, sebagian masyarakat, pemerhati pendidikan, dan orangtua murid masih merasa tidak siap jika pelaksanaan pendidikan dikembalikan segera kepada sistem PTM. Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga telah melakukan kajian dan hasilnya belum merekomendasikan dimulainya sekolah tatap muka dalam waktu dekat. Beberapa alasan yang menjadi pertimbangan terutama karena perkembangan pandemi Covid-19 secara nasional yang kembali meningkat, serta karena ditemukannya varian baru virus corona sejak Maret 2021, dan cakupan imunisasi Covid-19 di Indonesia yang belum memenuhi target.

Kondisi lapangan di Indonesia memang saat ini masih menunjukkan peningkatan kasus positif COVID-19 yang signifikan. Berdasarkan data yang dibagikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Kamis sore, tercatat ada 8.892 kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dimana Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar kasus secara nasional. Secara rata-rata, kasus positif mingguan Covid-19 kembali mengalami kenaikan sejak minggu ketiga Mei 2021. Pada minggu pertama Juni, kasus mingguan bertambah sebanyak 40.280 kasus. Sebelumnya, rata-rata penambahan kasus di angka di bawah 40.000 kasus pada akhir Maret 2021 lalu. Sementara, penambahan mingguan kasus meninggal juga belum menurun, masih di atas 1.000 kasus.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Komisi IV (Kesra) Dewan Riset Daerah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Sekolah Kajian Strategik Global, Universitas Indonesia berinisiatif untuk melakukan kajian bersama untuk melihat lebih dalam terkait kesiapan Provinsi DKI Jakarta dalam

melaksanakan PTM. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang didapatkan dari literature dan data perkembangan covid, termasuk informasi yang diperoleh dari webinar yang mengundang berbagai pihak yang kompeten sebagai narasumber untuk menjelaskan gambaran kesiapan rencana PTM dan mendiskusikan kebijakan yang tepat agar keputusan PTM benar-benar berdampak baik bagi sektor pendidikan, khususnya pada anak didik.

B. TUJUAN

Kegiatan ini secara umum dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji kondisi kesiapan pelaksanaan PTM dan merekomendasikan kebijakan yang tepat bagi pemerintah DKI Jakarta. Secara spesifik, tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk mendiskusikan latar belakang dorongan kebijakan Pembelajaran Tatap Muka pada Bulan Juli 2021, khususnya di Provinsi DKI Jakarta
- b) Untuk mengetahui persiapan yang telah dilakukan untuk kebijakan PTM
- c) Untuk mendiskusikan potensi dampak positif dan negatif dari kebijakan PTM khususnya pada anak didik
- d) Untuk mengetahui dampak covid pada perkembangan anak didik
- e) Untuk mendiskusikan kebijakan yang tepat untuk mekanisme pembelajaran pada saat ini

C. METODOLOGI

Kajian Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Di Provinsi DKI Jakarta ini dilakukan dengan menggunakan metodologi *exploratory sequential design* dimana analisa diawali dengan pengumpulan data kualitatif dan kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif. Penekanan utama pada strategi ini terletak pada analisa data kualitatif dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut : 1. Studi Literatur tentang fungsi dan peran birokrasi dan tata kelola pemerintahan dalam mendukung pembangunan serta program-program di bidang pemerintahan di DKI Jakarta yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022 serta Kegiatan Strategis Daerah 2. Diskusi internal lintas komisi di Dewan Riset Daerah untuk mendapatkan masukan bagi penajaman fokus dan metodologi penelitian 3.

Webinar dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan (pemerintah daerah, peneliti, akademisi dan unsur masyarakat) 4. Analisa data yang diperoleh dari instansi pendidikan dan pakar kesehatan anak.

D. JADWAL KEGIATAN WEBINAR

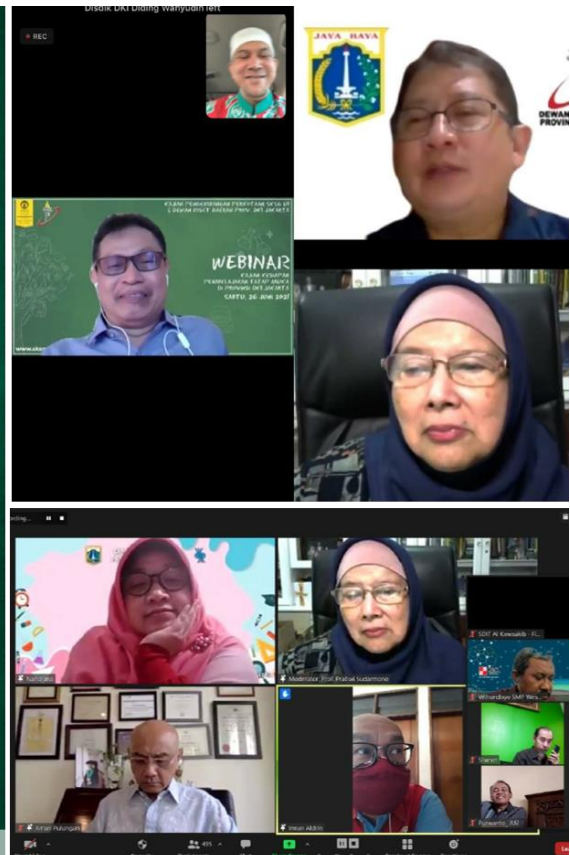
Kajian Kesiapan Pembelajaran Tatap Muka

Di Provinsi Dki Jakarta

Sabtu, 26 Juni 2021

WAKTU	'	AGENDA	KETERANGAN
09.00 – 09.05	5'	Pembukaan	H. Erick Yusuf, S.Sy, M.Pd , Ketua Komisi IV DRD DKI Jakarta
09.05 – 09.10	5'	Kata Sambutan DRD	Prof Kemas Ridwan Kurniawan, Ketua Dewan Riset Daerah DKI Jakarta
09.10 – 09.15	5'	Kata Sambutan SKSG - UI	Athor Subroto, PhD, Direktur Sekolah Kajian Stratejik Global, Universitas Indonesia
09.15 – 10.15	60'	Penyampaian Materi oleh Narasumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. Nahdiana, M.Pd Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2. Prof. Aman Pulungan, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia 3. Dr. Renny Nurhasana, Dosen Sekolah Kajian Global dan Strategik Studies, Universitas Indonesia <p>Moderator : Prof. Pratiwi Pujilestari Sudarmono, Komisi IV Dewan Riset Daerah DKI Jakarta</p>
10.15– 11.15	60'	Sesi Diskusi/Tanya Jawab	Peserta dan Narasumber

11.15 – 11.30	15'	Penutupan dan Sesi Foto Bersama	Ketua Komisi IV DRD / Moderator
---------------	-----	---------------------------------	---------------------------------



Catatan:

Link Zoom Meeting <https://linktr.ee/sksgui> Meeting ID: 833 2152 8704 Passcode: kppdrd2606

Video rekaman youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=pHo0D7HCU2c>

E. TEMUAN DAN ANALISIS

1. Dorongan untuk melakukan kebijakan PTM di Provinsi Jakarta dilatar belakangi oleh tiga hal:

Faktor yang pertama adalah karena kegiatan belajar mengajar secara daring di Indonesia, termasuk di Jakarta, dapat dikatakan belum siap. Hal ini terutama dikarenakan proses

pelaksanaan pembelajaran daring di Indonesia belum memiliki acuan tetap yang dalam hal ini berupa belum adanya kurikulum pembelajaran daring. Selanjutnya, kualitas faktor pendukung proses pembelajaran secara daring Indonesia juga masih belum merata. Apabila penggunaan metode daring masih diteruskan sementara kualitas faktor pendukungnya masih rendah, maka kualitas luaran proses pendidikan diprediksi akan terus menurun.

Faktor yang kedua adalah karena dorongan SKB yang ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan yang menyatakan institusi pendidikan dan sekolah agar bisa melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada tahun ajaran 2021.

Sementara **faktor terakhir** terkait dengan target *herd immunity* yang dianggap cukup berhasil di Jakarta . Cakupan vaksinasi tahap pertama di provinsi DKI Jakarta telah mencapai 102,03 persen. Angka ini mencakup vaksinasi kepada 8565,93 ribu jiwa dari sasaran vaksin yang ditetapkan sebanyak 8.4 juta jiwa. Sedangkan untuk vaksinasi tahap dua hingga awal Agustus telah tercapai 42,74 persen dari target. Untuk usia remaja, vaksinasi tahap 1 telah tersalurkan kepada 718,5 ribu jiwa (71,84 persen target), adapun untuk vaksinasi tahap kedua baru mencapai 8,75 persen atau tersalurkan kepada 87,51 ribu jiwa.

2. Untuk melaksanakan PTM di masa Pandemi, Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah mempersiapkan perencanaan yang meliputi tahapan sebagai berikut, :

Pertama, melakukan asesmen kesiapan pembelajaran PTM yang meliputi dua komponen yaitu asesmen siap buka sekolah dan asesmen siap mengajar. Asesmen siap buka sekolah bertujuan untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan pembelajaran *blended learning*, dengan hasil boleh atau tidak sebuah satuan pendidikan dapat menyelenggarakan PTM. Sementara untuk melihat kesiapan kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan metode pembelajaran kombinasi (*blended learning*) yang bermakna merupakan tujuan dari asesmen yang kedua, yaitu asesmen siap mengajar. Asesmen kedua ini diharapkan dapat memberikan hasil keputusan terkait apa saja kebutuhan pendidik yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam situasi pandemic

Kedua, melakukan piloting berdasarkan asesmen yang telah dibuat. Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan, tercatat 266 Sekolah telah melakukan ujicoba PTM yang dikordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada awal Juni 2021.

Setelah melakukan piloting, **tahapan selanjutnya** adalah dengan melakukan PPKBB (Pelaksanaan Pembelajaran pada Kebiasaan Baru Bertahap). Pada tahapan ketiga ini akan dilakukan implementasi PTM secara bertahap dengan mempertimbangkan durasi belajar , materi pengajaran, mekanisme money , serta izin dari orangtua murid.

3. Potensi dampak positif dan negatif dari kebijakan PTM khususnya pada anak didik

Penanganan pandemi harus memprioritaskan anak-anak sebagai masa depan bangsa. Semakin lama pandemi berlangsung – semakin banyak anak yang akan kehilangan hak-haknya terutama pada aspek pendidikan. **Metode pembelajaran daring yang selama ini di lakukan memberikan dampak penurunan kualitas** terutama karena ketiadaan kurikulum pembelajaran daring dan rendahnya faktor pendukung seperti jaringan, literasi, dsb.

Sekolah yang tutup , serta pembelajaran daring juga semakin memperparah kesenjangan antar kelas sosioekonomi karena anak yang tidak mempunyai internet memadai akan semakin tertinggal secara akademis dan sulit lepas dari kemiskinan. Risiko pernikahan anak, kehamilan, kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat . Menurunnya kualitas kesehatan mental anak, masalah nutrisi yang meningkat juga menjadi dampak ikutan yang ditimbulkan. Karena itu **PTM menjadi metode yang didorong untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik.**

Walaupun PTM diharapkan memberikan efektivitas pengajaran yang tidak didapatkan dari pembelajaran daring, tetapi ada resiko atau potensi negative dari PTM yang dapat muncul terutama dengan mempertimbangkan **cukup tingginya kasus positif pada usia anak** yaitu sebesar 12,3 % dari keseluruhan kasus positif.

Selain itu beberapa studi menunjukkan fenomena long covid yang perlu mendapat perhatian khusus dan dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan terhadap anak. Studi dari sebuah RS

di Italia (pre-print) menunjukkan 52.7% pasien anak dengan COVID-19 masih merasakan gejala yang persisten hingga lebih dari empat bulan pasca terdiagnosis penyakit seperti insomnia , fatigue, nyeri sendi dan permasalahan pernapasan. Sementara kasus dari Swedia menunjukkan adanya anak dengan usia 9-15 tahun yang mengalami gejala yang sama setelah 6-8 bulan terkonfirmasi positif Covid.

F. REKOMENDASI

1. Dalam jangka pendek, pemerintah diharapkan untuk mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran tatap muka secara matang. Persiapan yang dilakukan menurut prioritas yang telah diteliti adalah menyiapkan sumber daya manusia, menyiapkan sarana dan prasarana, mengurus perizinan aktivitas pembelajara, dan imunisasi vaksin COVID-19 secara berurutan.
2. Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19
3. Sekolah tatap muka menjadi pilihan yang bisa direkomendasikan dengan mempertimbangkan :
 1. tingkat positivity rate dan dibawah 5%, dan tingkat kematian menurun,
 2. Harus menyiapkan blended learning, dan orang tua murid bebas memilih. Pilihan belajar daring harus mendapatkan hak dan perlakuan yang sama dengan mereka yang memilih PTM.
 3. Seluruh guru, pengurus sekolah, dan pihak yang terlibat dalam aktviitas PTM, harus sudah divaksin
 4. melakukan secara berkala disinfektan, swab dengan tetap menerapkan protocol kesehatan
 5. Pihak sekolah memiliki mekanisme mitigasi jika terdapat kasus positif.